

Esai Dewan Kesenian Jakarta

Dari Periode Transisi Menuju Penguatan Posisi

Aquino Hayunta

Sudah dua tahun saya berkarya sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dan pada rentang waktu tersebut banyak hal yang membukakan mata saya sebagai pegiat seni yang peduli terhadap perkembangan sektor seni. Uraian berikut berasal dari pengalaman tersebut.

Selama ini posisi DKJ belum lah berwibawa di mata para pemangku kepentingannya, baik itu pemerintah daerah maupun para seniman. Hanya sebagian kecil saja dari seniman yang menganggap bahwa DKJ itu punya posisi yang strategis. Ini tampak ketika Komisi Simpul Seni, komisi tempat saya bertugas, melakukan sarasehan keliling dengan para pegiat seni di enam kotamadya di Jakarta. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendengar aspirasi, masukan dan kritikan dari para pegiat seni di Jakarta, baik masukan terhadap DKJ maupun terhadap sektor seni secara umum.

Umumnya para pegiat seni tersebut belum mengetahui apa fungsi dan tugas DKJ, dan bahkan sebagian belum mengenal siapa itu DKJ. Bagi yang sudah kenal DKJ, umumnya mereka menyampaikan berbagai macam kritik antara lain mempertanyakan apa saja yang sudah DKJ lakukan demi kepentingan sektor seni, dan agar DKJ jangan “mengambil jatah para pegiat seni dalam menyelenggarakan kegiatan seni” dan sejumlah kritik lainnya.

Selain itu di mata birokrasi, peran DKJ juga belum maksimal, belum benar-benar dianggap sebagai mitra gubernur dalam pembuatan kebijakan seni. Oleh Dinas Kebudayaan terkesan DKJ dianggap sebagai penyelenggara program yang mirip dengan sanggar-sanggar yang menjadi asuhan dinas kebudayaan, sehingga DKJ pun diperlakukan sama seperti sanggar, yaitu tidak dilibatkan dalam berbagai perencanaan kebijakan. Anggaran DKJ pun ditekan sampai ke angka 1,2 milyar rupiah setahun, yang tentu saja jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Instansi lain seperti Bappeda pada awalnya belum melibatkan DKJ dalam penyusunan rencana pembangunan.

Posisi ini sangat berbeda dengan posisi Dewan Transportasi Jakarta misalnya, yang dilibatkan dalam berbagai penyusunan kebijakan transportasi di Jakarta.

Untuk membangun atau mengembalikan wibawa DKJ, saya akan meneruskan kegiatan-kegiatan yang sudah saya bantu (dikerjakan bersama-sama dengan anggota lainnya) lakukan selama ini, yaitu dengan menambah visibilitas dan penguatan posisi DKJ di mata para pemangku kepentingan.

Dimulai dari merebut peran sebagai penasihat kebijakan, dengan berupaya masuk ke dalam perbincangan RPJPD dan RPJMD yang dilakukan oleh Bappeda, lalu komunikasi yang intens dengan dinas kebudayaan terkait dengan berbagai kebijakan seni, mengadakan forum dialog antara seniman dengan para calon gubernur dan wakil gubernur, kunjungan ke sejumlah anggota DPRD, audiensi dengan gubernur terpilih, komunikasi dengan Bappeda dan lembaga lainnya termasuk dengan PT MRT Jakarta dalam pengembangan kawasan seni Blok M Hub.

Komisi Simpul Seni juga telah mencoba untuk membangun dialog dan komunikasi dengan berbagai kelompok seni, melalui sarasehan-sarasehan. Ada sarasehan yang dilakukan berbasis wilayah enam kotamadya, ada yang dilakukan berbasis kelompok seni, seperti sarasehan dengan kelompok seniman perempuan, seniman yang aktif berkegiatan di TIM, seniman yang bersinggungan dengan isu-isu demokrasi, seniman yang terlibat dengan teknologi AI dan sejumlah kelompok lainnya. Dialog ini

membuka komunikasi antar para pegiat seni, mengumpulkan berbagai masukan untuk pengembangan kebijakan serta meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas dari DKJ.

Selain itu kami juga mengadakan dialog dan pengembangan kerjasama dengan sejumlah negara-negara sahabat, terutama dengan negara-negara yang punya pusat kebudayaan. Dua buah MoU telah lahir dari upaya ini yaitu dengan Kedutaan Iran dan dengan Ukrainian Institute. Ini juga sebagai upaya untuk menempatkan DKJ kembali ke dalam percaturan seni internasional dan mengembalikan kegiatan seni lintas negara ke TIM atau kawasan seni lainnya di Jakarta.

Menariknya, semua upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan pengurus harian, kerjasama dengan komite maupun komisi lain. Inilah fungsi dari Komisi Simpul Seni, yaitu merajut relasi antar para pemangku kepentingan. Jadi ini bukan lah klaim hasil kerja sebuah komisi saja atau seseorang saja, melainkan upaya kolaboratif di dalam internal DKJ.

Saat ini mulai terlihat ada perkembangan dari upaya-upaya ini, telah terjadi sejumlah kolaborasi yang sifatnya konseptual (bukan *event* / acara) dengan Dinas Kebudayaan, seperti kerja bareng DKJ dan Dinas Kebudayaan untuk mengembangkan *Jakarta Cultural Directory*, sebuah database yang berisi kekayaan kultural dari Jakarta, sebuah upaya yang sebelumnya dijalankan sendiri-sendiri oleh DKJ (melalui Komisi Simpul Seni) dan Dinas Kebudayaan. Sekarang upaya ini dijalankan bersama secara sinergis oleh kedua belah pihak. Selain itu komunikasi dengan Balai Kota berlangsung dengan baik, sehingga upaya untuk merevisi Keputusan Gubernur terkait DKJ, AJ maupun terkait Tata Kelola TIM bisa berjalan dengan lancar. Upaya untuk kebijakan pengelolaan satu pintu TIM juga menunjukkan perkembangan positif karena dibantu didorong oleh Balai Kota. DKJ pun terlibat pembicaraan dengan Bappeda dan suku-suku dinas kebudayaan dalam rencana pengembangan kebijakan pembangunan terkait seni. DKJ melalui Komisi Simpul Seni telah merencanakan kerja sama dengan PT MRT Jakarta dalam mengembangkan kawasan Blok M sebagai kawasan seni.

Audiensi dengan anggota DPRD telah memasukkan berbagai ide kebijakan seni bagi mereka, dan secara langsung terlihat dari naiknya anggaran daerah untuk DKJ, dari 1,7 M pada tahun 2024, menjadi 4,9 M di tahun 2025, dan masih akan meningkat lagi di tahun 2026. Meningkatnya anggaran ini tentu perlu dikawal pelaksanaannya agar tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Selain itu sebagai anggota perseorangan dalam DKJ, saya juga turut membantu munculnya Kode Etik DKJ, yang di dalamnya mengatur mengenai perilaku etis yang diharapkan dapat berlangsung di DKJ dan kawasan TIM. Kode Etik ini termasuk untuk mencegah pelecehan seksual, konflik kepentingan, tindak *bullying*, korupsi, dan tindakan tidak etis lainnya. Kode Etik ini telah diadopsi ke dalam perhelatan Festival Teater Jakarta misalnya, di mana para peserta yang akan tampil dalam FTJ diminta untuk menandatangani persetujuan mereka terhadap kode etik tersebut. Kode Etik ini masih harus dilengkapi dengan sejumlah SOP lainnya, misalnya SOP anti konflik kepentingan (yang memastikan bahwa program yang dikerjakan DKJ tidak didasarkan pada kepentingan pribadi para anggotanya) dan SOP keuangan (yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan).

Upaya-upaya tersebut tentu saja perlu dilanjutkan dan dikembangkan sehingga fungsi kekonsilinan dari DKJ benar-benar terlaksana secara optimum. Jika saya terpilih kembali menjadi anggota DKJ untuk periode berikutnya, maka saya akan berusaha agar kerja-kerja peningkatan visibilitas dan wewenang serta kerja perapihan organisasi ini terus berlanjut. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilanjutkan sebagaimana telah disinggung di sejumlah bagian uraian di atas, terutama bagaimana DKJ bisa makin berperan dan dipandang penting dalam pembuatan kebijakan seni kota Jakarta dan bagaimana DKJ bisa bertransformasi sepenuhnya menjadi lembaga yang kredibel di mata publik. Lembaga yang transparan, yang akuntabel, yang memikirkan kepentingan publik seni, bukan kepentingan pribadi anggotanya. Lembaga yang menjamin diterapkannya etika terkait hak asasi manusia, kesetaraan gender, prinsip *good governance*.

Ini adalah kerja kolektif bersama para anggota yang sifatnya lintas komite dan komisi, sehingga memerlukan anggota-anggota DKJ yang satu visi dan satu perspektif, yang tidak mementingkan kepentingan sektor seninya sendiri saja.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa DKJ bukan lah Dewan Kesenian Taman Ismail Marzuki, sehingga pengaruh dan lingkup kerja DKJ jangan sampai terbatas hanya di seputar Taman Ismail Marzuki belaka. Sebagai kota global, Jakarta perlu mengembangkan sejumlah kawasan seni. Dulu ketika TIM dibangun, Indonesia memang masih ada di dalam era pemerintahan Orde Baru yang otoriter, sehingga TIM menjadi oase penting tempat di mana kita bisa “melarikan diri” dari iklim otoriter dan memperoleh sedikit kelegaan di TIM. Namun di era yang konon demokratis ini, oase itu haruslah tersebar di makin banyak tempat, bukan sebatas TIM saja. Kawasan-kawasan seni dan budaya ini lah yang perlu dikawal perkembangannya ke depan. DKJ bisa berfungsi sebagai jembatan bagi komunitas seni untuk bisa berkesenian dengan bebas di banyak kawasan seni. Dengan seni pula masyarakat Jakarta bisa menjadi masyarakat yang lebih lunak, lebih menghargai perbedaan (karena terbiasa berjumpa dengan ekspresi seni yang beragam) dan lebih demokratis. Ini lah fungsi seni yang ke depannya perlu didorong terus oleh DKJ.

Pegiat-pegiat seni Jakarta pun perlu difasilitasi agar ada ruang berekspresi berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan atau kotamadya sampai tingkat propinsi, dari sini akan lahir seniman-seniman tangguh yang siap memberikan kontribusi di tingkat nasional dan internasional dan mendorong Jakarta benar-benar menjadi kota global, kota yang siap bertukar pengetahuan, yang standar kehidupannya makin bermutu.